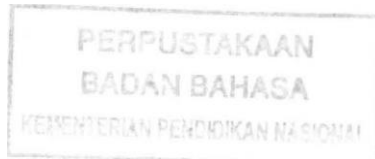


MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN

PUTUSAN
KONGRES BAHASA INDONESIA IX
TAHUN 2008



**PUTUSAN
KONGRES BAHASA INDONESIA IX**



KEPUTUSAN
KONGRES INTERNASIONAL IX BAHASA INDONESIA
Jakarta, 28 Oktober—1 November 2008

Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober—1 November 2008 dan dihadiri oleh lebih dari 1.300 peserta yang mewakili peneliti bahasa dan sastra, guru bahasa dan sastra, dosen, pakar bidang ilmu, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, politisi, ahli hukum, pers, dan mahasiswa, baik yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar negeri, yakni Amerika Serikat, Australia, Azarbaijan, Belanda, Brunei Darussalam, China, Filipina, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Korea, Malaysia, Papua Nugini, Prancis, Rusia, Singapura, Suriname, dan Timor Leste. Setelah mendengar dan memperhatikan

1) Sambutan Menteri Pendidikan Nasional

2) Laporan Kepala Pusat Bahasa

serta membahas 8 makalah sidang pleno, 11 makalah sidang panel, dan 94 makalah sidang kelompok, serta hasil-hasil sidang tersebut, Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia menetapkan putusan sebagai berikut.

1. BAGIAN UMUM

Dalam era teknologi informasi dan komunikasi ini setiap bangsa berupaya keras untuk mempertahankan identitasnya. Identitas itu terancam oleh proses homogenisasi budaya yang dipicu oleh keberhasilan industri budaya dari negara-negara lain. Dunia kini menjadi tanpa batas dan tidak bisa lagi bertahan dari lima gelombang besar yang memengaruhi gaya hidup dan cara berpikir. Kelima gelombang itu adalah gelombang manusia,

teknologi, media massa, ideologi, dan gelombang modal yang mengalir dari satu negara ke negara lain. Oleh karena itu, apabila tidak memiliki ketahanan budaya yang kuat, setiap bangsa akan kehilangan identitasnya. Untuk itu, diperlukan insan Indonesia yang cerdas dan berdaya saing (kompetitif).

Insan Indonesia yang memiliki kecerdasan kompetitif adalah insan yang tidak tercerabut dari akar budayanya. Oleh karena itu, kecerdasan kompetitif insan Indonesia didukung oleh kekayaan budaya etnik yang dikembangkan dalam interaksi budaya antaretnik yang membentuknya menjadi insan Indonesia yang toleran yang menerima kebhinekaan sebagai kenyataan dalam budaya nasional yang menjadi jati diri bangsa. Insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif itu sadar akan kekayaan budaya nasional dan toleran menerima keberagaman budaya, seda dapat mengembangkan kepribadiannya dalam interaksi antarbangsa. Kecerdasan kompetitif insan Indonesia tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai jalur kegiatan, seperti kegiatan pendidikan, politik, sosial, ekonomi, kultural, pertahanan, dan media massa. Oleh karena itu, penggunaan bahasa dalam segala kegiatan itu dan apresiasi sastra hendaknya dapat terus ditingkatkan untuk mencapai mutu yang tinggi.

2. BAGIAN KHUSUS

2.1 KEBIJAKAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN

Kedudukan dan fungsi bahasa dan sastra Indonesia dan daerah serta dan asing untuk kemajuan bangsa Indonesia perlu dirumuskan dalam Undang-Undang Kebahasaan. Untuk melaksanakan Undang-Undang itu diperlukan juga berbagai strategi pengembangan dan pembinaan yang tepat sesuai dengan kondisi masyarakat.

2.2 KEBAHASAAN

2.2.1 Bahasa Indonesia

- 1) Selain melanjutkan kajian-kajian linguistik terapan, kajian linguistik deskriptif terhadap bahasa Indonesia perlu ditingkatkan untuk kepentingan kodifikasi bahasa.
- 2) Dalam meningkatkan kualitas bahasa hukum dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan ahli bahasa yang memahami hukum dan ahli hukum yang mempunyai kemahiran berbahasa Indonesia.
- 3) Selain dikembangkan menjadi bahasa modern yang mampu menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa Indonesia juga harus dikembangkan untuk menjadi sarana pembentukan insan yang cerdas dan kompetitif.
- 4) Untuk memartabatkan bahasa Indonesia, terutama di luar negeri, penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan bahasa melalui kongres/seminar/konferensi internasional dan publikasi ilmiah perlu ditingkatkan.
- 5) Untuk meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai bagian dari jati diri bangsa, penggunaan bahasa Indonesia dalam segala bidang kehidupan, termasuk di ruang publik, perlu diperluas jangkauannya dan dipertinggi mutunya.

2.2.2 Bahasa Daerah

- 1) Penelitian tentang jumlah bahasa dan kekerabatan antarbahasa yang ada di Indonesia perlu dilakukan secara berkelanjutan karena masih banyak bahasa daerah yang belum terinventarisasi dan terkodifikasi. Bidang penelitian mencakup bidang stuktur bahasa, sociolinguistik,

etnolinguistik, pemetaan bahasa, perbandingan bahasa, perkembangan bahasa, dan sebagainya.

- 2) Pendokumentasian bahasa daerah sebagai perwujudan peta wilayah dan budaya perlu terus dilakukan dan disempurnakan.
- 3) Untuk menjaga ketahanan bahasa dan sastra daerah, hendaknya kedudukan serta fungsi bahasa dan sastra daerah di tengahnya kehidupan bahasa Indonesia dan bahasa asing dimantapkan.
- 4) Pelestarian bahasa daerah, termasuk aksaranya, baik melalui jalur pendidikan formal, nonformal maupun informal perlu dilakukan secara berkelanjutan dan diatur dalam peraturan pada tingkat pusat dan daerah.

2.2.3 Bahasa Asing

- 1) Pembelajaran bahasa asing perlu ditingkatkan mutunya dalam kaitannya dengan pembentukan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif dalam masyarakat global, yang ditandai oleh kemampuan berkomunikasi secara aktif.
- 2) Pembelajaran bahasa asing dapat ditingkatkan melalui jalur formal dan nonformal dengan penyediaan sumber daya manusia yang tersertifikasi.
- 3) Penguasaan bahasa asing diperlukan sebagai salah satu sarana untuk membentuk insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif yang dapat bersaing dengan masyarakat global.

2.3 KESASTRAAN

Sastra Indonesia adalah bagian penting dalam kebudayaan Indonesia yang majemuk. Oleh karena itu, sastra Indonesia secara alamiah merupakan produk peradaban yang lahir,

tumbuh, dan berkembang dalam situasi budaya majemuk. Kemajemukan budaya merupakan bagian dari dunia batin sastra Indonesia. Selanjutnya, dalam konteks kebhinekatunggalikaan sastra Indonesia dan sastra daerah diharapkan memiliki potensi yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena pemahaman yang mendalam terhadap aspirasi, kekuatan, kekurangan, pandangan hidup, dan pandangan dunia dari kelompok-kelompok etnik yang menjadi warga bangsa dapat ditimba dari keduanya.

Pemanfaatan sastra Indonesia dan sastra daerah sebagai salah satu instrumen dalam pendekatan kebudayaan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang multikultural dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, perlu digunakan pendekatan kolaborasi yang berfungsi sebagai sarana peningkatan pengelolaan sumber daya dan pengintegrasian batas-batas kepentingan antara pengarang, pemerintah, dan pemilik modal.

Melalui sastra, bahasa dapat lebih mudah memaksimalkan perannya dalam pembentukan karakter bangsa. Dengan kekhasannya, sastra, baik lisan maupun tertulis dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa daerah dapat lebih menarik ditampilkan karena, antara lain, mengungkapkan berbagai pengetahuan tentang manusia dan kehidupannya secara indah dan menyentuh hati. Dengan fungsi dan perannya masing-masing, sastra Indonesia dan sastra daerah secara bersama-sama mampu mewujudkan "keindonesiaan", baik dalam arti politis maupun budaya.

Untuk memperlihatkan kekuatan sastra dalam pembentukan karakter bangsa, diperlukan strategi yang dapat diterima oleh masyarakat dari berbagai kalangan.

Keanekaragaman situasi dan kondisi membentuk seseorang dan/atau komunitas masyarakat dalam mewujudkan kebudayaannya. Sebaliknya, keaneragaman budaya dan masyarakat pendukung juga menentukan situasi dan kondisi yang beraneka ragam. Keanekaragaman itu pada satu Sisi merupakan khazanah yang amat berharga yang telah diwariskan dan menjadi identitas pemiliknya, tetapi pada Sisi lain merupakan pemicu perpecahan. Oleh karena itu, apa yang diyakini sebagai warisan budaya suatu komunitas, misalnya, perlu dimaknai juga dalam bingkai warisan budaya secara nasional dan internasional.

Strategi yang tepat dan konkret justru dimulai dari peran serta masyarakat pemilik warisan budaya yang bersangkutan. Dalam kaitan itu sangat penting untuk menempatkannya sebagai sinergi antara ilmuwan, masyarakat, dan birokrasi yang secara politis dianggap sebagai penentu kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pengoordinasian antarlembaga, baik pemerintah maupun nonpemerintah, perlu ditingkatkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan secara kreatif sumber budaya dan sastra.
- 2) Pemetaan sastra daerah dalam upaya penyelamatan warisan budaya dan sastra untuk mengenali peradaban bangsa Indonesia dan menelusuri kekerabatan antarberbagai jenis dan bentuk sastra daerah.
- 3) Pengkajian sastra daerah sebagai pemer kaya sastra Indonesia perlu dilakukan sebagai upaya pemahaman lintas budaya untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

- 4) Penelaahan sastra Indonesia dilakukan dengan sudut pandang yang berorientasi pada peradaban bangsa Indonesia.
- 5) Penelitian sastra Indonesia dan daerah hendaknya ditujukan pada upaya penyiapan pangkalan data bagi pengembangan bahan pembelajaran.
- 6) Estetika sastra daerah yang semakin tersisihkan perlu direvitalisasi.
- 7) Penyebaran karya sastra Indonesia dan penerjemahannya ke dalam bahasa asing dan karya sastra daerah ke dalam bahasa Indonesia perlu digiatkan dalam program yang terpadu dan terencana.
- 8) Pembinaan sastra perlu terus ditingkatkan dengan berbagai kegiatan, antara lain kegiatan penulisan karya kreatif, penghargaan sastra, dan festival sastra.

2.4 PENGAJARAN BAHASA DAN SASTRA

Penyempurnaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia serta daerah perlu dimaksimalkan melalui berbagai inovasi dan dipertimbangkan relevansinya dengan kurikulum yang berlaku.

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, sebagai pencetak calon guru bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, perlu menyesuaikan kurikulumnya dengan kurikulum yang berlaku di semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA atau yang sederajat.

Selain metode pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan materi, dibutuhkan metode khusus guna menanamkan sikap positif serta rasa bangga terhadap bahasa dan sastra Indonesia.

A. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia perlu dimaksimalkan melalui inovasi pada dua aspek utama, yaitu materi dan metodologi.

a. Aspek Materi

Pembelajaran bahasa dan sastra menurut ketentuan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) harus diawali dengan wacana (karya sastra). Oleh sebab itu, wacana sebagai materi pokok pembelajaran perlu memenuhi kriteria kelayakan, antara lain, sebagai berikut.

- 1) Materi memenuhi aspek keluasan materi yang memenuhi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK/KD), yang disertai dengan materi penunjang lain yang relevan dengan jenjang pendidikan serta tingkat usia peserta didik.
- 2) Materi memenuhi aspek kedalaman materi yang diawali dengan materi sederhana ke kompleks, dan dari konkret ke abstrak sesuai dengan jenjang pendidikan serta tingkat usia peserta didik.
- 3) Materi memenuhi prinsip kepentingan lokal (kontekstual), nasional/regional, dan kepentingan global.
- 4) Materi harus memenuhi, paling tidak, empat aspek kecerdasan menurut paradigma pendidikan nasional, yaitu: kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan social.
- 5) Materi pembelajaran dalam bentuk wacana (karya sastra) perlu memenuhi standar keterbacaan sesuai jenjang pendidikan dan tingkat usia peserta didik.

- 6) Kompetensi kebahasaan guru perlu terus ditingkatkan dengan mengikuti perkembangan bahasa dan sastra Indonesia yang berkiblat pada Pusat Bahasa.

b. Aspek Metodologi Pembelajaran Bahasa dan Sastra

- 1) Metodologi pembelajaran bahasa secara tradisional harus ditinggalkan dan mulai menerapkan metode-metode pembelajaran bahasa baru yang relevan dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
- 2) Metode pembelajaran bahasa dan sastra selain berorientasi pada penguasaan materi, juga perlu menerapkan metode khusus yang dipandang mampu menanamkan sikap positif dan bangga terhadap bahasa dan sastra Indonesia;

B. Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah

Keberadaan bahasa daerah sebagai salah satu bahasa yang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dijadikan bahasa ibu menempati posisi yang sangat strategis dalam membangun insan cerdas kompetitif. Dengan bahasa ibu, anak Indonesia tidak hanya dididik bagaimana berpikir runtut, logis melalui pemakain bahasa secara baik dan benar; bermoralitas tinggi melalui pilihan bahasa yang disesuaikan dengan siapa mitra wicaraanya, atau melalui keteladanan tokoh-tokoh dalam cerita lokal; juga dididik agar menjadi insan yang menghayati nilai-nilai keindahan melalui penguasaan syair-syair atau lagu-lagu lokal. Mengingat lengkapnya pencapaian tujuan umum pendidikan anak manusia yang dapat dicapai melalui bahasa ibu, perlu dirumuskan kemungkinan pengembangan bahan pembelajaran bahasa dan sastra daerah dengan penekanan pada

kompetensi pengembangan logika, etika, dan estetika di samping penekanan pada kompetensi yang berhubungan dengan pengembangan empat keterampilan berbahasa: menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.

Bukti-bukti linguistik yang berupa kesamaan sejarah atau asal bahasa-bahasa di Indonesia dapat dijadikan salah satu bahan ajar dalam rangka menumbuhkan pemahaman kebinekaan dalam ketunggalikaan. Oleh karena itu, perlu dikaji kemungkinan pemanfaatan bukti kebahasaan tersebut sebagai bahan pembelajaran dengan mempertimbangkan:

- a. bahan disesuaikan dengan jenjang pendidikan peserta didik,
- b. semakin tinggi jenjang pendidikan peserta didik, semakin banyak bahasa daerah lain yang dipahami memiliki sejarah yang sama dengan bahasa daerahnya sehingga akan semakin luas pemahaman makna kebinekaan dalam ketunggalikaan. Berdasarkan uraian di atas, perlu diupayakan tindak lanjut berikut.

1. Penelitian bahasa daerah hendaknya ditujukan pada upaya penyiapan pangkalan data bagi pengembangan bahan pembelajaran, yang dapat berupa penelitian berikut.
 - a. Pelanjutan penelitian pemetaan bahasa-bahasa di Indonesia untuk mengetahui secara jelas bahasa-bahasa yang belum terpetakan di Indonesia serta mengetahui bahasabahasa yang berada dalam ancaman kepunahan.
 - b. Penelitian kekerabatan dan pengelompokan bahasa-bahasa dengan tidak hanya memanfaatkan bidang kajian linguistik, tetapi juga dengan memanfaatkan bidang ilmu lain yang terkait, seperti penelitian linguistik dan genotipe.

- c. Penelitian pengembangan bahasa dengan tujuan standardisasi bahasa serta standardisasi aspek kebahasaan: seperti standardisasi ejaan, tata bahasa, dan perkamusan.
2. Penelitian sastra daerah yang ditujukan untuk mengidentifikasi bentuk sastra dalam komunitas pemakai bahasa-bahasa daerah.
3. Penelitian geosastra yang bertujuan menelusuri relasi kekerabatan antarberbagai jenis dan bentuk sastra daerah yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai kelompok etnik di Indonesia.
4. Pengembangan kurikulum dan silabus, bahan pembelajaran, serta petunjuk pembelajaran bahasa dan sastra daerah.
5. Penyediaan tenaga pembelajaran bahasa dan sastra daerah yang memiliki kompetensi.
6. Mengusahakan payung hukum dalam bentuk Perda sebagai dasar pembelajaran bahasa dan sastra daerah.

C. Pendidikan Bahasa Asing

- 1 Pendidikan bahasa asing perlu ditingkatkan mutunya dalam kaitannya dengan pembentukan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif yang dapat bersaing dalam masyarakat global.
- 2 Pendidikan bahasa asing dapat ditingkatkan melalui jalur formal dan nonformal dengan penyediaan sumber daya manusia yang tersertifikasi dan berpengalaman.
- 3 Sarana dan mutu pendidikan bahasa asing perlu ditingkatkan dalam upaya pembentukan insan Indonesia

yang cerdas dan kompetitif yang dapat bersaing dengan masyarakat global.

- 4 Pendidikan bahasa asing dimaksudkan untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif yang dapat dibanggakan tanpa melupakan jati diri dan nilai-nilai keindonesiaan, yang mampu berkomunikasi dalam bahasa asing yang sesuai dengan konteks.

TINDAK LANJUT

- 1) Pengajaran sastra perlu dilakukan dengan wawasan sastra daerah, sastra nasional, dan sastra dunia.
- 2) Pengajaran sastra Indonesia dan daerah ditujukan untuk menumbuhkan apresiasi sastra, ekspresi sastra, dan kreasi sastra.
- 3) Perlu dilakukan pengembangan kurikulum dan silabus, bahan pembelajaran, petunjuk pembelajaran, dan pengembangan alat evaluasi bagi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.
- 4) Perlu penyediaan tenaga pengajar bahasa dan sastra Indonesia dan daerah yang memiliki kompetensi.

2.5 BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING

Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) memiliki peran yang sangat strategis dalam pencitraan negara dan bangsa Indonesia. Keberhasilan program BIPA yang setakat ini sudah diselenggarakan di berbagai institusi, baik di dalam maupun luar negeri, akan berdampak positif terhadap pandangan dan penyikapan negara dan bangsa mancanegara terhadap Indonesia.

Pada kenyataannya, kondisi objektif penyelenggaraan program BIPA masih berjalan menurut versi kelembagaan masing-masing terutama di dalam negeri. Konsekuensinya, berbagai hal yang terkait dengan perangkat penyelenggaraan dan komponen pendukung program juga sangat bergantung dan berorientasi pada versi kelembagaan. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kinerja program, diperlukan pengembangan dan pematapan sistem kelembagaan BIPA yang menjadi acuan penyelenggaraan BIPA secara nasional. Dengan adanya sistem kelembagaan BIPA, penyelenggaraan program BIPA akan menjadi lebih jelas dan terarah. Di samping itu, tata laksana penyelenggaraan program BIPA juga menuntut perhatian dari pemerintah (dalam hal ini Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional dan sejumlah departemen ataupun institusi pemerintah terkait) sedemikian rupa sehingga kualitas proses dan capaian program BIPA dapat lebih ditingkatkan.

Sehubungan dengan hal itu, sejumlah upaya nyata perlu dilakukan dengan melibatsertakan semua pihak atau unsur yang terkait. Upaya-upaya dimaksud, di antaranya, sebagai berikut.

- 1) Sistem kelembagaan BIPA yang profesional sebagai acuan institusional penyelenggaraan program BIPA perlu diwujudkan.
- 2) Perlu dilanjutkan kebijakan strategis penyelenggaraan program BIPA, baik di dalam maupun luar negeri, yang menyangkut pemetaan penyelenggaraan program BIPA, kerja sama (kolaborasi) antarinstitusi penyelenggara BIPA, penyediaan tenaga pengajar BIPA yang profesional, dan pengembangan paket silabus, media, bahan evaluasi, serta bahan ajar BIPA.

3) Perlu dilanjutkan dan dikembangkan pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri (selain di Australia) sebagai wahana informasi dan sosialisasi BIPA.

2.6 MEDIA MASSA

Fungsi dan peran media massa (dalam arti luas) sebagai salah satu pilar penyangga demokrasi tidak hanya sebagai sarana komunikasi dan sumber informasi, tetapi juga mengemban misi pendidikan untuk pencerdasan anak bangsa. Dalam fungsinya sebagai sarana komunikasi dan sumber informasi, media massa seyogianya ikut berperan aktif menyampaikan berbagai hal kepada khalayak tentang keberadaan bahasa Indonesia, termasuk di dalamnya mengenai kebijakan kebahasaan. Adapun terkait dengan fungsinya sebagai media pendidikan, media massa harus dapat menjadi contoh dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, cerdas dan segar. Untuk itu, insan media massa harus menguasai keterampilan berbahasa Indonesia sesuai dengan kaidah yang berlaku serta memiliki komitmen untuk menerapkan keterampilan berbahasanya dalam bidang tugas mereka sehari-hari sebagai bentuk tanggung jawabnya selaku pengemban misi pencerdasan bangsa.

Pada era kesejagatan seperti sekarang ini disadari bahwa peran media massa semakin penting dalam upaya menjaga dan mengembangkan peradaban bangsa, termasuk pengembangan bahasa Indonesia. Dalam hubungan ini, Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia mengingatkan kembali kepada insan media massa akan tanggung jawabnya tersebut mengingat peran dan fungsi media massa yang bisa memengaruhi pola pandang, pola pikir, dan perilaku khalayak pembaca, penonton dan/atau pendengarnya. Media massa, bahkan, kini disadari menjadi salah satu rujukan penting bagi masyarakat pengguna bahasa

Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda melalui dunia pendidikan sehingga dalam kadar tertentu media massa ikut menentukan perkembangan bahasa Indonesia. Untuk itu, kesadaran akan tanggung jawab sebagai anak bangsa yang ikut mengemban dan menjaga peradaban bangsa perlu terus digelorakan di kalangan insan media massa.

Di tengah berbagai tantangan kebahasaan yang dihadapi oleh bahasa Indonesia, sudah sepatutnya apabila media massa ikut mengambil peran kesejarahan dalam pemertabatan bahasa Indonesia sehingga pada gilirannya bisa menjadi sarana pembentukan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu tindak lanjut sebagai berikut.

- 1) Peningkatan profesionalisme di kalangan insan media massa perlu terus dilakukan dengan memperkuat basis keterampilan berbahasa Indonesia, baik secara internal maupun melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait.
- 2) Untuk menghindari penggunaan varian bahasa Indonesia ragam jurnalistik yang cenderung merusak upaya pengembangan bahasa Indonesia, perlu ada kesepahaman di kalangan pengelola media massa untuk melahirkan bahasa Indonesia ragam jurnalistik yang baku.
- 3) Pengayaan bahasa Indonesia, khususnya menyangkut kosakata baru, oleh media massa tetap diperlukan, baik yang bersumber dari bahasa daerah maupun bahasa asing, tetapi harus menjaga keseimbangan agar tidak saling meminggirkan dan/atau mematikan.
- 4) Pusat Bahasa perlu terus melanjutkan dan meningkatkan kerja sama kebahasaan dengan insan media massa.

- 5) Media massa perlu memberi ruang khusus atau rubrik pembinaan bahasa Indonesia.
- 6) Dunia perfilman perlu meningkatkan pemanfaatan karya sastra Indonesia dan daerah sebagai bahan penulisan skenario serta memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

REKOMENDASI:

- 1) Pusat Bahasa perlu meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait sehubungan dengan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dan daerah dalam upaya membangun insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.
- 2) Pusat Bahasa perlu meningkatkan pelayanan dan penyebaran produk-produknya sehingga masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkannya.
- 3) Pusat Bahasa perlu meningkatkan pengkajian, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia serta melakukan konservasi dan promosi bahasa dan sastra daerah secara lebih intensif.
- 4) Dalam menyikapi perkembangan situasi global, Pusat Bahasa perlu melanjutkan penyusunan kamus istilah di berbagai bidang ilmu.
- 5) Istilah Indonesia bidang keilmuan dijadikan rujukan dalam penulisan karya ilmiah (skripsi, tesis, disertasi) dan Pusat Bahasa perlu menyediakan Situs istilah bidang ilmu tersebut.
- 6) Pemerintah perlu menindaklanjuti putusan kongres-kongres sebelumnya, antara lain, peningkatan status kelembagaan Pusat Bahasa dan mengkaji ulang keberadaan Badan Pertimbangan Bahasa.

- 7) Kongres mengamanatkan kepada pemerintah dan DPR agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kebahasaan menjadi Undang-Undang Kebahasaan sesuai dengan amanat LJUD 45, Pasal 36c.
- 8) Kongres mengamanatkan kepada Pemerintah agar memiliki komitmen untuk menduniakan bahasa Indonesia, antara lain, melalui BIPA dan mengirimkan pakar-pakar bidang bahasa dan sastra, serta pengajarannya ke pusat-pusat pembelajaran BIPA di luar negeri.
- 9) Kongres mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mendirikan Pusat Terjemahan yang menangani penerjemahan karya-karya bangsa Indonesia ke dalam bahasa asing dan sebaliknya, yang antara lain bertugas melakukan penerjemahan dan pemasaran produk terjemahan tersebut.
- 10) Kongres mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menerapkan Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI) sebagai salah satu persyaratan dalam menduduki jabatan tertentu dan pengangkatan CPNS.

Jakarta, 1 November 2008

Tim Perumus Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia

1. Ayu Sutarto (Ketua merangkap Anggota)
2. Dendy Sugono (Sekretaris merangkap Anggota)
3. Mahsum (Anggota)
4. Djumadi (Anggota)
5. Suparno (Anggota)
6. Pudentia (Anggota)
7. Katherina E. Sukamto (Anggota)
8. Abdul Rozak Zaidan (Anggota)
9. Muh. Rapi Tang (Anggota)
10. Widodo A.S. (Anggota)
11. Kenedi Nurhan (Anggota)
12. Sugiyono (Anggota)
13. Mu'jizah (Anggota)



Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Daksinapati Barat IV
Rawamangun, Jakarta Timur